

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Individualized Educational Program (IEP) diberikan oleh guru pendamping khusus ketika anak berkebutuhan khusus dengan ketunaan *low vision* kurang bisa memahami materi yang disampaikan guru mata pelajaran di dalam kelas. Anak berkebutuhan khusus tersebut akan dibawa ke ruangan khusus untuk mendapatkan penjelasan ulang mengenai materi oleh guru pendamping khusus. Adanya *Individualized Educational Program (IEP)*, anak berkebutuhan khusus dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru pendamping khusus dan menerapkannya dalam keidupan sehari-hari, serta membantu mempermudah mengerjakan soal-soal latihan dengan kaca pembesar dan lampu belajar yang telah disediakan. Pada saat mengerjakan soal-soal latihan, anak berkebutuhan khusus tidak dituntut untuk setara dengan anak normal lainnya. Hal tersebut dikarenakan, jika anak berkebutuhan khusus bisa mengerjakan lima soal dari sepuluh soal yang diberikan sudah dapat dinyatakan tuntas.

B. Implikasi

Implikasi penelitian tentang *Individualized Educational Program (IEP)* bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam pembelajaran PKn di sekolah inklusif Smp Negeri 1 Sentolo tahun pelajaran 2015/2016 antara lain:

1. Penelitian tentang *Individualized Educational Program (IEP)* bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam pembelajaran PKn di sekolah inklusif SMP Negeri 1 Sentolo tahun pelajaran 2015/2016 dapat menjadi referensi untuk sekolah inklusif tentang pentingnya *Individualized Educational Program (IEP)* bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) supaya mencapai hasil maksimal dalam proses belajar.
2. Adanya sekolah inklusi dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antara anak normal terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki kekurangan.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi guru inklusif, diharapkan bisa memberikan pendampingan atau *Individualized Educational Program (IEP)* kepada anak berkebutuhan khusus lainnya seperti *slow learner* agar lebih fokus ketika proses belajar berlangsung, sehingga tingkat pemahaman materi anak berkebutuhan khusus *slow learner* dapat seimbang dengan anak normal.
2. Bagi guru PKn, diharapkan menggunakan media pembelajaran yang bisa dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus dengan ketunaan low vision yang mendapatkan pendampingan *Individualized Educational Program (IEP)* agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan memahami serta menerapkan materi yang disampaikan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baihaqi & Sugiarmen. 2006. *Memahami dan Membantu Anak ADHD*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budiyanto. 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2009. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta: PT. Intan Sejati Klaten.
- Effendi, Mohammad. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Elfindri,dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media
- Hadis, Abdul. 2006. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Autistik*. Bandung: Alfabeta.
- Ilahi, Takdir, Mohammad. 2013. *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhammad, Jamila. 2008. *Special Education For Special Children*. Bandung: PT. Mizan Publika
- Rahayu, Sri, Ani.2013. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rocyadi, Alimin. 2005. *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat P2TK dan KPT.
- Smith, J David. 2009. *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung: Nuansa.

Soemantri, T Sutjihati. 2007. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sriharini,dkk. 2008. *Kapita Selekta Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono,dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. SUN

Walfarianto. 2014. *Kurikulum dan Buku Teks PKn (Kubuteks)*. Yogyakarta: Laboratorium PKn dan Hukum UPY.

Sumber Undang-Undang

Permendiknas No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi.

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1.

UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber Internet

Agung.2011: <https://agungborn91.wordpress.com/2011/02/15/pengertian-dan-tujuan-pendidikan-kewarganegaraan/>, diunduh tanggal 30 Desember 2015.

Aina,2013:https://sites.google.com/site/muyanabanten/student-ofthemoth/pengertian_tujuandanruanglingkupmapelpknsmp, diunduh tanggal 30 Desember 2015.

Devi.2013:<http://lousieaen.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-kesulitan-belajar-dan-gejala.html?m=1>, diunduh tanggal 22 November 2015.

Eppy.2008:<http://slb-sukapura.blogspot.co.id/2012/10/strategi-pembelajaranindividuallized.html?m=1>, diunduh tanggal 29 November 2015.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 373198, 376808, 373038 Fax. (0274) 376808
website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : A. 396 /FKIP UPY/II/2016

Yogyakarta, 02 Maret 2016

Hal : *Surat Ijin Penelitian*

Kepada Yth. :

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

c.q. Kabiرو Administrasi Pembangunan Setda DIY

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

di Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta, dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

Nama : **UKHTI SHALIAH**

Nomor Mahasiswa : 121 443 00034

Semester/Program Studi : VIII / PPKn

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat Mahasiswa : Tegallembut, Giripeni, Wates, Kulon Progo

Judul Penelitian : ANALISIS INDIVIDUALIZAD EDUCATIONAL PROGRAM (IEP) BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH INKLUSI SMP NEGERI 1 SENTOLO TAHUN 2015/2016

Waktu Penelitian : bulan Maret - Mei 2016

Tempat Penelitian : SMP N 1 Sentolo, Kulon Progo

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

2. Kepala SMP N 1 Sentolo

3. Mahasiswa yang bersangkutan

D: \Administrasi\surat\Surat_riset.doc



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN SENTOLO
SMP NEGERI 1 SENTOLO
SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)
SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPI)

Alamat : Jalan Siwalan, Sentolo, Kulon Progo 55664 Telp. 6472156, Email : smp_1sentolo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 42.4/ 173

Berdasarkan surat dari kantor Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor : 070.2/00223/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, tentang Izin Penelitian.

1.	Pejabat yang memberikan keterangan	: Kepala SMP Negeri 1 Sentolo
	Nama	: SUMIJO, S.Pd., M.M.
	NIP	: 19600613 198601 1 003
	Jabatan	: Guru Pembina
	Pangkat/Golongan	: Pembina/IVa
2.	Nama / NIM	Ukhti Shalihah / 12144300034
	Prodi	Pendidikan Kewarganegaraan
	Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
	Perguruan Tinggi	Universitas PGRI Yogyakarta
3.	Menerangkan	Bahwa mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Individualized Educational Poragram (IEP) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Inklusi SMP Negei 1 Sentolo Tahun 2015/2016" .
4.	a. Lamanya	3 (tiga) bulan
	b. Waktu	04 Maret s/d 04 Juni 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sentolo, 26 Mei 2016
Kepala Sekolah,

SUMIJO, S.Pd., MM.
Pembina, IVa
NIP. 19600613 198601 1 003

SILABUS

Nama Sekolah : SMP N 1 Sentolo
Mata Pelajaran : PKn
Kelas / Semester : VIII / 2
Standar Kompetensi : 5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia
Tahun Pelajaran : 2015 / 2016

No	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran			Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar	Karakter
			Tatap Muka	Penugasan Mandiri Terstruktur	Penugasan Mandiri Tidak Terstruktur					
	5.1. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian kedaulatan rakyat Sifat-sifat kedaulatan Macam-macam teori kedaulatan Dasar hukum kedaulatan rakyat Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan 	Menelaah dari literatur dan mendiskusikan tentang pengertian, dasar hukum kedaulatan rakyat, sifat dan macam-macam kedaulatan, serta lembaga pelaksana kedaulatan rakyat	Siswa mengerjakan LKS 1 dalam diktat halaman 25 s.d. 28 Dikumpulkan pertemuan berikutnya !		<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan pengertian kedaulatan rakyat Mendeskripsikan sifat-sifat kedaulatan Mendeskripsikan macam-macam teori kedaulatan Menunjukkan dasar hukum kedaulatan rakyat Mendeskripsikan lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan 	<ul style="list-style-type: none"> Tes Tertulis (Uraian, Tes Pilihan Ganda, dan bentuk lainnya) Tes Unjuk Kerja (Tugas kelompok /individu, pengamatan dan lainnya) Untuk siswa ABK dengan "law vision" dengan menggunakan tes lisan/ dengan pendampingan oleh guru ABK. 	4 x 40'	<ul style="list-style-type: none"> PKn VIII. Dasim Budimasyah. 2007. Epsilon Group: Bandung PKn VIII. Tim Abdi Guru. 2006. Erlangga: Jakarta PKn VIII. Dadang Sundawa dkk. 2008. Pusat Pembinaan : Depdiknas Seribu Pena Pkn. Dahlan Saronji. 2008. Erlangga : Jakarta PKn VIII. Sunardi dkk. 2007. Tiga Serangkai : Solo UUD 1945 hasil amandemen Buku yang relevan, Media Cetak dan Media Elektronik Diktat Pkn untuk kelas VIII tahun pelajaran 2015/2016 	Berpikir logis, kritis

Menelaah dari literatur tentang sistem pemerintahan UUD 1945	5.2. Mende skripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Peran lembaga Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 	Menelaah dari literatur tentang sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Mendiskusikan hasil kajian literature tentang peran lembaga Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat	Siswa mengerjakan LKS 2 dalam diktat halaman 30 s.d. 33 Dikumpulkan pertemuan berikutnya!	Siswa diminta secara kelompok membuat kliping tentang sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945. Kliping diberi tanggapan/komentar	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Mendeskripsikan peran lembaga Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> Tes Tertulis (Uraian, Tes Pilihan Ganda, dan bentuk lainnya) Tes Unjuk Kerja (Tugas kelompok /individu, pengamatan dan lainnya) Untuk siswa ABK dengan "law vision" dengan menggunakan tes lisan/ dengan pendampingan oleh guru ABK. 	4 x 40'	<ul style="list-style-type: none"> PKn VIII. Dasim Budimasyah.2007. Epsilon Group: Bandung PKn VIII. Tim Abdi Guru.2006. Erlangga: Jakarta PKn VIII. Dadang Sundawa dkk. 2008. Pusat Pembinaan : Depdiknas Seni Pena Pkn. Dahlan Saronji.2008. Erlangga : Jakarta PKn VIII. Wahyu Nugroho.2007. Pustaka Bengawan: Solo PKn VIII. Sunardi dkk.2007. Tiga Serangkai : Solo UUD 1945 hasil amandemen Buku yang relevan, Media Cetak dan Media Elektronik Diktat Pkn untuk kelas VIII tahun pelajaran 2015/2016 	Demokratis
	5.3. Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia Contoh bentuk penerapan 	Mengamati dan mendiskusikan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia	Siswa mengerjakan LKS dalam diktat hal 34 - 36	Siswa melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat sekitarnya yang menunjukkan sikap positif	<ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia Memberikan contoh bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> Tes Tertulis (Uraian, Tes Pilihan Ganda, dan bentuk lainnya) Tes Unjuk Kerja (Tugas kelompok /individu, 	2 x 40'	<ul style="list-style-type: none"> PKn VIII. Dasim Budimasyah.2007. Epsilon Group: Bandung PKn VIII. Tim Abdi Guru.2006. Erlangga: Jakarta PKn VIII. Dadang Sundawa dkk. 2008. Pusat Pembinaan : 	Menghargai karya dan prestasi Bertanggungjawab

	sistem pemerintahan Indonesia	prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan tokoh keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan	prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan	prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan	terhadap kedaulatan rakyat. Jika perlu bisa bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat ! Hasil dikumpulkan !	penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan	pengamatan dan lainnya)	Depdiknas	
							• Untuk siswa ABK dengan "law vision" dengan menggunakan tes lisan/ dengan pendampingan oleh guru ABK.	<ul style="list-style-type: none"> • Senibu Pena Pkn. Dahlan Saronji. 2008. Erlangga : Jakarta • Pkn VIII. Wahyu Nugroho. 2007. Pustaka Bengawan: Solo • Pkn VIII. Sunardi dkk. 2007. Tiga Serangkai : Solo • UUD 1945 hasil amandemen • Buku yang relevan, Media Cetak dan Media Elektronik 	
								• Diklat Pkn untuk kelas VIII tahun pelajaran 2015/2016	

Mengetahui
Kepala SMP N 1 Sentolo
SITI MARWATI, S.Pd., MM.
NIP. 19600613 198601 1 003

Sentolo, 4 Januari 2016
Guru Mata Pelajaran
SITI MARWATI, S.Pd.
NIP. 19750506 200701 2 011

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

- Nama Sekolah : SMP N 1 Sentolo
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester : VIII / 2
Tahun Pelajaran : 2015 / 2016
Standar Kompetensi : 5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia
Kompetensi Dasar : 5.3. Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia
- Indikator : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia
2. Memberikan contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan
- Alokasi Waktu : 2 x 40' (1 x pertemuan)
- A Tujuan Pembelajaran : Setelah proses pembelajaran siswa dapat :
1. Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia
2. Memberikan contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan
- * Karakter siswa yang diharapkan :
• Menghargai karya dan prestasi
• Bertanggungjawab
- B Materi Pembelajaran :
• Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia
• Contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan
- C Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, telaah buku
D Sumber Belajar : Buku PKn Kelas VIII, Artikel/berita di media massa, Buku yang relevan, Internet
- E Langkah-langkah Pembelajaran :
- Pertemuan I
- Materi Pembelajaran :
• Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia
• Contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan

No	Langkah Kegiatan Pembelajaran	Waktu
	Tatap Muka	
1	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> Apersepsi : <ul style="list-style-type: none"> Guru memeriksa kesiapan siswa dalam pembelajaran (presensi, kebersihan kelas, dll) (<i>Nilai disiplin, rajin</i>) Memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan terkait materi kedaulatan rakyat Informasi kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran 	10 menit

2	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Eksplorasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Siswa memperhatikan tayangan video pembelajaran tentang penerapan demokrasi dalam kehidupan keluarga2) Siswa memperhatikan file powerpoint sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan <p>2. Elaborasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Siswa mendiskusikan dalam kelompok yang telah dibentuk tentang video pembelajaran, contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kenegaraan• Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompok untuk dipresentasikan• Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan ditanggapi kelompok lain <p>3. Konfirmasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Siswa memperhatikan klarifikasi yang diberikan guru• Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa• Melakukan refleksi pelaksanaan kegiatan	50 menit
3	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none">• Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan materi dari hasil diskusi• Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan materi pertemuan selanjutnya	20 menit
Non Tatap Muka		
<p>PMT</p> <p>Siswa mengerjakan LKS 3 dalam diktat hal 34 - 36</p>	<p>PMTT</p> <p>Siswa melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat sekitarnya yang menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat. Jika perlu bisa bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat ! Hasil dikumpulkan !</p>	

F. Penilaian Hasil Belajar

1) Teknik

- : 1) Tes Tertulis
2) Tes Unjuk Kerja

Untuk siswa ABK dengan "*low vision*" dengan menggunakan tes lisan/ dengan pendampingan oleh guru ABK.

2) Bentuk Instrumen

- : 1) Tes Pilihan Ganda
2) Lembar Pengamatan (Terlampir)

Soal Pilihan Ganda

- Peran serta siswa SMP dalam mewujudkan kedaulatan rakyat adalah
 - ikut merayakan kampanye di kampungnya
 - menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilu
 - masa bodoh bukan urusan seorang siswa SMP
 - membuat corat coret gambar atribut parpol di tempat umum
- Keterlibatan rakyat secara langsung sebagai pelaksanaan kedaulatan adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - mengisi keanggotaan DPR
 - mengisi keanggotaan DPD
 - memilih Mahkamah Yudisial
 - memilih Presiden dan Wakil Presiden
- Setiap warga negara harus meyakini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu kita harus

- A. tidak perlu campur tangan dengan urusan politik, karena bisa membahayakan diri
B. percaya sepenuhnya dan menyerahkan urusan pembangunan kepada wakil rakyat
C. menyerahkan semua urusan pemerintahan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan
D. turut berperan serta dalam menyelesaikan pembangunan sesuai kemampuan
4. Contoh sikap positif yang bisa dilakukan siswa dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah adalah ...
A. bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah
B. menjaga kebersihan sekolah dengan melaksanakan tugas piket kelas
C. membantu menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban
D. bersedia untuk dipilih menjadi pengurus OSIS
5. Contoh bentuk peran serta warga Negara dalam menjaga tetap tegaknya Negara kesatuan RI yaitu ...
A. mematuhi hukum yang berlaku
B. membayar pajak sebelum ditagih
C. menghormati pejabat yang berkuasa
D. aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan
6. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kewibawaan pemerintah antara lain ...
A. memperbanyak jumlah pegawai negeri
B. menjaga tegaknya hukum yang berlaku
C. menambah jumlah polisi
D. meningkatkan kesejahteraan anggota TNI
7. Contoh peran serta warga Negara dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan cara ...
A. menghormati pejabat Negara yang berkunjung ke desa karena bisa membahayakan
B. membantu Kepala Desa dalam menarik PBB
C. mengikuti upacara peringatan hari besar nasional di stadion
D. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
8. Sikap warga Negara yang baik di dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah ...
A. menggunakan hak pilihnya agar dinilai orang yang baik
B. untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin menjadi pejabat
C. menggunakan hak pilih sesuai hati nuraninya
D. menggunakan hak pilihnya jika dijamin kerahasiaannya
9. Sikap warga Negara yang menjunjung tinggi kedaulatan Negara adalah ...
A. membela Negara jika diancam musuh
B. tidak bersedia bergaul dengan orang asing
C. menolak masuknya budaya asing
D. tidak mempelajari bahasa asing
10. Seorang warga Negara yang disiplin membayar pajak berarti ...
A. menghormati petugas pemungut pajak
B. memahami petugas pemungut pajak
C. berpartisipasi dalam pemerintahan
D. memahami undang-undang perpajakan
11. Sebagai warga Negara yang meyakini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maka akan ...
A. harus berusaha agar menjadi pemimpin
B. mengorganisasi politik warga Negara dalam lembaga demokrasi
C. mempunyai sikap peduli terhadap jalannya pemerintahan negara
D. wajib memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar
12. Contoh perilaku positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat adalah ...
A. suka mengalah dengan orang lain
B. menghargai pendapat orang lain
C. mengikuti pendapat teman
D. menuruti permintaan orang lain
13. Perilaku warga Negara yang memahami prinsip kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari akan ...
A. berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku menjadi pejabat
B. melakukan perbuatan sesuai tradisi masyarakat sekitar
C. mempelajari UU yang baru agar tidak ketinggalan jaman
D. memikirkan kondisi Negara dan perilaku pejabat tinggi negara
14. Peran serta pelajar dalam pemerintahan dapat diwujudkan dengan cara
A. ikut serta dalam kegiatan pemilu
B. ikut penelitian untuk mengembangkan iptek
C. mengkritik kebijakan pemerintah
D. bergabung dalam kegiatan partai politik
15. Berikut ini merupakan hak rakyat dalam ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, kecuali ...
A. aktif menjadi anggota partai politik
B. mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
C. aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
D. ikut dalam kegiatan unjuk rasa
16. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia dapat diwujudkan dengan cara ...
A. terlibat dalam kegiatan musyawarah
B. terlibat langsung dalam tawuran
C. terlibat dalam kelompok suporter sepakbola
D. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan teroris
17. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam pemerintahan yang menggunakan pendekatan ...
A. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
B. dari negara, oleh rakyat, dan untuk rakyat
C. dari rakyat, oleh negara, dan untuk rakyat
D. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk negara
13. Perilaku warga Negara yang memahami prinsip kedaulatan rakyat akan ...
A. berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku
B. melakukan perbuatan sesuai tradisi masyarakat sekitar
C. mempelajari UU yang baru agar tidak ketinggalan jaman
D. memikirkan kondisi Negara dan perilaku pejabat tinggi negara
14. Peran serta pelajar dalam pemerintahan dapat diwujudkan dengan cara
A. ikut serta dalam kegiatan pemilu
B. ikut penelitian untuk mengembangkan iptek
C. mengkritik kebijakan pemerintah
D. bergabung dalam kegiatan partai politik

18. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pernyataan tersebut merupakan contoh penerapan demokrasi di bidang
 - A. politik
 - B. hukum
 - C. Sosial budaya
 - D. ekonomi
19. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan negara hendaklah
 - A. dikuasai oleh para politisi
 - B. rakyat membela keberadaan negara
 - C. rakyat memegang kekuasaan tertinggi
 - D. ditentukan oleh keberadaan partai politik
20. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan sekolah adalah
 - A. berpartisipasi dalam pemilu
 - B. ikut dalam aksi demonstrasi
 - C. pemilihan Ketua OSIS
 - D. melakukan kerja bakti



Mengetahui
Kepala SMP N 1 Sentolo

Sumijo, S.Pd.,MM.
NIP. 19600613 198601 1 003

Mengetahui
Kepala SMP N 1 Sentolo

Sumijo, S.Pd.,MM.
NIP. 19600613 198601 1 003

Sentolo, 4 Januari 2016
Guru Mata Pelajaran

Marwati

Siti Marwati, S.Pd.
NIP. 19750506 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Ki Josuto Wates, Kulon Progo Telp. 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbah Wates, Kulon Progo Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 400 / 300 / KPTS/2012

TENTANG

PENUNJUKKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPI)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :
- Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan keragaman peserta didik di masyarakat, dalam sistem pendidikan inklusif yang berbasis budaya;
 - Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat, kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik untuk mewujudkan potensinya;
 - Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Tahun 2012.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Tahun 2012 dan daftar Nama-nama Sekolah terlampir;
- KEDUA : Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) perlu melakukan pembinaan dan pendampingan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 10-12-2012

Kepala

Dinas Pendidikan

Kulon Progo

Tahun 2012

Dra. Sri Mulatsih Damar Rahayu, M.Pd. 4

Berbina Utama Muda, IV/c

NIP 19570928 198303 2 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : / /KPTS/2012

TENTANG
PENUNJUKKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPI)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG
1	TK NEGERI PEMBINA WATES	TK/RA
2	TK NEGERI PEMBINA PANJATAN	TK/RA
3	TK NEGERI PEMBINA GALUR	TK/RA
4	SD NEGERI GADINGAN, WATES	SD/MI
5	SD NEGERI 1 GLAGAH, TEMON	SD/MI
6	SD NEGERI BUGEL, PANJATAN	SD/MI
7	SD NEGERI 2 SUNGAPAN, GALUR	SD/MI
8	SD NEGERI BUTUH, LENDAH	SD/MI
9	SD NEGERI NGENTAKREJO, LENDAH	SD/MI
10	SD NEGERI KALIMENUR, SENTOLO	SD/MI
11	SD NEGERI KALIKUTUK, SENTOLO	SD/MI
12	SD NEGERI JLABAN, SENTOLO	SD/MI
13	SD NEGERI SRIKAYANGAN, SENTOLO	SD/MI
14	SD NEGERI PERGIWATU, SENTOLO	SD/MI
15	SD NEGERI KALIAGUNG, SENTOLO	SD/MI
16	SD NEGERI NGENTO, PENGASIH	SD/MI
17	SD NEGERI 1 NGULAKAN, PENGASIH	SD/MI
18	SD NEGERI WIDORO, PENGASIH	SD/MI
19	SD NEGERI GUNUNGDAHI, PENGASIH	SD/MI
20	SD NEGERI MARGOSARI, PENGASIH	SD/MI
21	SD NEGERI SERANG, PENGASIH	SD/MI
22	SD NEGERI KOKAP	SD/MI
23	SD NEGERI TANJUNGHARJO, NANGGULAN	SD/MI
24	SD NEGERI 1 GIRIPURWO, GIRIMULYO	SD/MI
25	SD NEGERI MEJING, KALIBAWANG	SD/MI
26	SD NEGERI 1 SAMIGALUH	SD/MI
27	MI MA'ARIF PAGERHARJO, SAMIGALUH	SD/MI
28	SMP NEGERI 2 LENDAH	SMP/MTs
29	SMP NEGERI 1 SENTOLO	SMP/MTs
30	SMP NEGERI 3 SENTOLO	SMP/MTs
31	SMP MUHAMMADIYAH 2 SENTOLO	SMP/MTs
32	SMP NEGERI 2 KOKAP	SMP/MTs
33	SMA NEGERI 1 PENGASIH	SMA/SMK

KABUPATEN KULON PROGO
Kepala
Dinas Pendidikan

Dra. Sri Mulatsih Damar Rahayu, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19570928 198303 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN SENTOLO
SMP NEGERI 1 SENTOLO
SEKOLAH STANDAR NASIONAL

Alamat : Jalan Siwalan, Sentolo, Kulon Progo 55664 Telepon 6472156
Email : smp_1sentolo@yahoo.com Kode Pos 55664

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 SENTOLO
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 800/

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG
SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF SMP NEGERI 1 SENTOLO
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMP NEGERI 1 SENTOLO DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar pelaksanaan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo pada Tahun Pelajaran 2015/2016 perlu menetapkan Tim Pengembang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Mendiknas RI nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor 400/300/KPTS/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Dindik Kabupaten Kulon Progo tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Pembentukan Tim Pengembang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 1 pada Tahun Pelajaran 2015/2016 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masing-masing anggota tim sesuai dengan bidang tugasnya melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



1. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
2. Ka. UPTD PAUD DAN DIKDAS Kec. Sentolo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN
UPTD PAUD DAN DIKDAS KECAMATAN SENTOLO
SMP NEGERI 1 SENTOLO
SEKOLAH STANDAR NASIONAL

Alamat : Jalan Siwalan, Sentolo, Kulon Progo 55664 Telepon 6472156
Email : smp_1sentolo@yahoo.com Kode Pos 55664

TIM PENGEMBANG SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
SMP NEGERI 1 SENTOLO
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO.	NAMA	NIP	GOL RUG	JABATAN	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	SUMIJO, S.Pd.,MM	19600613 198601 1 003	IV / a	Penanggungjawab Program	Kepala Sekolah
2	IG. MUJIWINARNO, S.Pd.	19590318 198803 1 003	IV / a	Penanggungjawab Kegiatan	Guru
3	SHOBIRI, S.Pd.	19680318 199702 1 002	IV / a	Ketua I	Guru
4	LAILA MAHMUDAH, S.Ag.	19570509 193303 2 004	IV / a	Ketua II	Guru
5	SUDARYANTA, S.Pd.	19671220 199512 1 004	IV / a	Sekretaris I	Guru
6	JAZIM HAMIDI, S.Pd.	19581007 198103 1 013	IV / a	Sekretaris II	Guru
7	SRI SARJUNYATI, S.Pd.	19640412 198412 2 008	IV / a	Bendahara I	Guru
8	ASRI ASIH, S.Pd.	19740429 200604 2 003	III / c	Bendahara II	Guru
9	ANDRIANI WIJAYANTI, S.Pd.	19680601 199302 2 001	IV / a	Pengembangan Standar Isi	Guru
10	SUWANDI, S.Pd.	19670416 199303 1 013	IV / a	Pengembangan SKL	Guru
11	PURWANTI, S.Pd.	19740316 200801 2 007	III / b	Pengembangan Standar Proses	Guru
12	SUWANTIEM, S.Pd.	19640225 198412 2 002	IV / a	Pengembangan PTK	Guru
13	WIGATI, S.Pd.	19610828 198112 2 003	IV / a	Pengembangan Standar Pengelolaan	Guru
14	JUMINGIN, S.Pd.	19631108 198602 1 002	III / d	Pengembangan Standar Sarpras	Guru
15	Dra. SRI WARNI	19661124 199203 2 005	IV / a	Pengembangan Standar Pembiayaan	Guru
16	SITI MARWATI, S.Pd.	19750506 200701 2 011	III / c	Pengembangan Standar Penilaian	Guru
17	Drs. NASRODIN	19640417 200701 1 013	III / c	Humas dan Kerjasama	Guru
18	JUMINGIN, S.Pd.	19631108 198602 1 002	III / d	Humas dan Kerjasama	Guru
19	SURANA, S.Pd.	19650426 199003 1 006	IV / a	Layanan ABK	Guru
20	EPA YULIANA, S.Pd.	-	-	Layanan ABK	Guru
21	TRESNANING PUTRI, S.Pd.	-	-	Layanan ABK	Guru
22	AGUNG PURNOMO, S.Pd.,M.Si	1791105 200604 1 004	III / c	Administrasi dan Dokumentasi	Kasubag TU
23	SUGIYARTO	19670310 196203 1 009	III / b	Administrasi dan Dokumentasi	TU





operator1@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/131/3/2016

Membaca Surat : **DEKAN FKIP**
Tanggal : **2 MARET 2016**

Nomor : **A.396/FKIP UPY/II/2016**
Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **UKHTI SHALIAH** NIP/NIM : **121 443 00034**
Alamat : **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**
Judul : **ANALISIS INDIVIDUALIZAD EDUCATIONAL PROGRAM (IED) BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH INKLUSI SMP N 1 SENTOLO TAHUN 2015/2016**
Lokasi : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
Waktu : **4 MARET 2016 s/d 4 JUNI 2016**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 MARET 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO**
- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
- DEKAN FKIP, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**
- YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00223/III/2016

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/v/131/3/2016, Tanggal: 04 Maret 2016, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : **UKHTI SHALIHAH**
NIM / NIP : **12144300034**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **ANALISIS INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PROGRAM (IEP) BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH INKLUSI SMP NEGERI 1 SENTOLO TAHUN 2015/2016**

Lokasi : **SMP NEGERI 1 SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO**
Waktu : **04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**

Pada Tanggal : **07 Maret 2016**

KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembin Tk.I ; IV/b
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan Sentolo
6. Kepala SMP Negeri 1 Sentolo
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PENELITIAN

Saat pelajaran PKn di kelas berlangsung



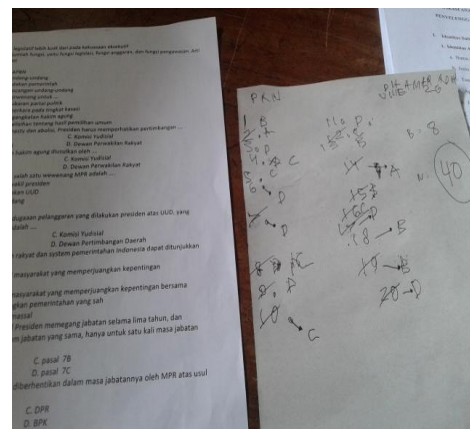
Penelitian terhadap Anak Berkebutuhan Khusus



Pendampingan guru inklusi secara individu (IEP) di perpustakaan



Hasil pekerjaan ABK





Wawancara dengan
Kepala SMP Negeri 1 Sentolo



Wawancara dengan guru PKn



Wawancara dengan guru inklusi atau
guru pendamping khusus (GPK)



Wawancara dengan ABK

SMP Negeri 1 Sentolo

